



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Imam Gunarto
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
3. NHK : 136647

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.541.350.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 46.850.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 46.850.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 46.850.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/27 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 133.600.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/27 m2 di KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 167.200.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/86 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 399.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, Toyota Kijang Innova Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, Honda Vario Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 40.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	791.982.903
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.772.332.903
III. HUTANG	Rp.	9.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.763.332.903

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.